

## ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN UMUM, TINGKAT EKONOMI, DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PBB MASYARAKAT DESA DAN KOTA DENGAN VARIABEL MODERATING KONTROL PETUGAS DESA/KELURAHAN (STUDI KASUS PADA KABUPATEN DEMAK)

Carola Ditta Surya Putri, Jaka Isgiyarta<sup>1</sup>

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### ABSTRACT

*Land and Building Tax (PBB) is one of the regional revenue that are important because it is used for regional development. In addition, Land and Building Tax (PBB) has the largest taxpayers than the other tax, and revenues from year to year increased by a greater percentage than the other taxes. Therefore, the Tax Compliance from the PBB's tax payers is important in its contribution to the development and prosperity of the region. This study is conducted to determine the factors that may affect the Land and Building Tax Compliance in Demak and to compare the Tax Compliance from Urban taxpayers and Rural taxpayers. The tax payer's compliance is influenced by factors General Knowledge, Economic Level, and Tax Knowledge which is moderating by the Control Officer Rural/Urban Village.*

*All variables were measured using a 5-point Likert scale questionnaire. Population of this study is taken from Demak Regency and samples were taken by purposive sampling method. The method of testing is done by linear regression analysis and t-test-test is processed by SPSS version 21.*

*The results have shown that the common knowledge and tax knowledge is not a significant influence on the Tax Compliance. Whereas, the economy level can provide a significant and negative impact on the Tax Compliance. On the other hand, the Control Officer Village / Village can strengthen the influence of General Knowledge and Economic Level of the Tax Compliance. However, the control officer actually weaken the influence of the Tax Compliance and Tax Knowledge.*

*Keywords: Land and Building Tax, Tax Compliance, Theory of Planned Behavior, Actual Behavioral Control*

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan negara yang tidak memberikan balas jasa secara langsung, sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat tanpa balas jasa secara langsung dapat dibedakan menjadi berbagai jenis, salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki nilai rupiah yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, tetapi PBB mempunyai dampak yang luas karena digunakan untuk pembangunan daerah. Selain itu, PBB juga mempunyai wajib pajak terbesar dibandingkan pajak-pajak lainnya, penerimaan PBB dari tahun ke tahun terus meningkat dan mempunyai persentase yang lebih besar dibandingkan dengan persentase kenaikan pajak lain dan APBN (Suhardito dan Sudiby, 1999). Kenaikan penerimaan tersebut tidak terlepas dari kepatuhan

---

<sup>1</sup> Corresponding author

masyarakat dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB tentu saja dapat dilatarbelakangi oleh berbagai faktor.

Faktor pemicu kepatuhan pajak dapat berasal dari dalam diri wajib pajak sendiri maupun dari luar wajib pajak. Pengetahuan umum, tingkat ekonomi, dan pengetahuan akan perpajakan dari wajib pajak dapat dijadikan faktor-faktor pemicu kepatuhan pajak yang berasal dari dalam WP. Selain faktor-faktor tersebut, adanya kontrol dari petugas desa/kelurahan selaku pihak yang menagihkan pajak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan dari faktor-faktor yang berasal dari dalam WP tersebut. Kemampuan dan kemauan WP untuk membayar PBB tersebut, secara tidak langsung juga memberikan suatu kontribusi positif bagi pertumbuhan nasional di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai keragaman bentuk geografis, sosial, budaya, ras, serta agama. Keragaman tersebut merupakan salah satu faktor penting yang membentuk karakteristik penduduk yang berbeda dari suatu daerah dengan daerah lain. Karakteristik yang telah dibentuk dari penduduk di berbagai wilayah tersebut mengakibatkan perbedaan cara berpikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selain perbedaan cara berpikir dan berperilaku, karakteristik keragaman wilayah Indonesia tersebut juga dapat terlihat dalam mata pencaharian dari penduduk setempat. Penduduk yang tinggal di daerah perkotaan cenderung memilih pekerjaan di lingkungan perkantoran. Sedangkan di wilayah pedesaan, lebih cenderung memilih untuk bercocok tanam atau berdagang. Menurut Bintaro (2010), desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Di sisi lain, menurut Wirth (2009), kota adalah suatu pemilihan yang cukup besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. Perbedaan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan pendidikan dan kesejahteraan antara masyarakat desa dan kota.

Penelitian ini dilakukan di lingkup Kabupaten Demak dimana akan diambil sampel dari masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pusat kabupaten dan masyarakat yang tinggal di pinggiran kabupaten dan masih mempunyai corak pedesaan. Di samping itu, Kabupaten Demak merupakan daerah yang sangat potensial sebagai daerah penyangga roda perekonomian Jawa Tengah, dan terletak pada lalu lintas yang cukup ramai yaitu jalur Pantai Utara Laut Jawa. Selain itu, Kabupaten Demak juga sering dikenal dengan sebutan sebagai "Demak Kota Wali". Julukan tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat di Kabupaten Demak mempunyai dasar religi atau kepercayaan yang kuat sehingga mempunyai kecenderungan untuk melakukan hal yang tidak melanggar norma agama.

Dari pemaparan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latar belakang kehidupan masyarakat terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Demak. Latar belakang yang dimaksud meliputi pengetahuan umum wajib pajak, tingkat ekonomi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, serta kontrol petugas desa atau kelurahan yang berwenang untuk melakukan pungutan pajak.

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Kepatuhan pajak bumi dan bangunan mempunyai keterkaitan dengan perilaku yang dapat dijelaskan oleh *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991). *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa tindakan yang diambil oleh individu dipengaruhi oleh 3 jenis kepercayaan, yaitu: Pertama, *Behavioral beliefs*, yaitu merupakan keyakinan dari individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasinya (*beliefs strength and outcome evaluation*); Kedua, *Normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif yang muncul dari pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*); Ketiga, *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Dengan demikian, sikap (*attitude*) terhadap perilaku, norma-norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) akan menimbulkan niat perilaku (*behavioral intention*) yang mengakibatkan perilaku (*behavior*).

### **Pengetahuan Umum terhadap Kepatuhan PBB**

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar (Pius, 2001). Dalam proses belajar tersebut individu dibantu dengan panca indera yang dimiliki untuk dapat merespon setiap hal sehingga menimbulkan suatu rangsangan untuk bertindak. Tingkat pengetahuan umum yang dimiliki oleh setiap individu dapat berbeda antara yang satu dengan yang lain. Hal tersebut dapat dilatarbelakangi oleh berbagai faktor pendorong antara lain pendidikan, media, dan informasi yang dapat diperoleh oleh individu yang bersangkutan. Semakin baik pengetahuan umum yang dimiliki oleh wajib pajak, maka cara berpikir dan sikap yang ditunjukkan juga akan semakin baik. Salah satu perwujudannya adalah dengan memperlihatkan perilaku patuh membayar PBB. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis:

*H1: Pengetahuan Umum WP PBB Kabupaten Demak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.*

### **Pengetahuan Umum terhadap Kepatuhan PBB dengan moderasi Kontrol Petugas Desa/Kelurahan**

Pengetahuan umum mempengaruhi perilaku individu untuk patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Akan tetapi, adanya faktor kontrol dari luar individu seperti pengaruh kontrol yang diberikan oleh petugas desa/kelurahan selaku penarik PBB dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara pengetahuan umum dengan kepatuhan PBB. Apabila wajib pajak semakin merasakan adanya kontrol petugas desa/kelurahan dalam menagihkan PBB maka pengaruh pengetahuan umum yang berasal dari dalam diri wajib pajak terhadap kepatuhan PBB yang telah dibentuk semakin memperlihatkan kecenderungan niat (*intention*) yang semakin kuat, dan kemudian menunjukkan perilaku (*behavior*) patuh pajak. Oleh karena itu, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis:

*H2: Kontrol petugas desa/kelurahan memperkuat pengaruh antara Pengetahuan Umum WP PBB Kabupaten Demak terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.*

### **Tingkat Ekonomi terhadap Kepatuhan PBB**

Kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak kepada negara. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak tersebut pastinya dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila wajib pajak mempunyai pendapatan yang cukup, maka individu tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak tepat pada waktunya. Dengan demikian, semakin baik tingkat ekonomi wajib pajak maka niat untuk berperilaku patuh membayar PBB akan semakin tinggi. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis:

*H3: Tingkat Ekonomi WP PBB Kabupaten Demak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.*

### **Tingkat Ekonomi terhadap kepatuhan PBB dengan moderasi Kontrol Petugas Desa/Kelurahan**

Kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh wajib pajak dapat berhubungan dengan kepatuhan pembayaran pajak. Di sisi lain, adanya faktor dari luar wajib pajak seperti kontrol petugas desa/kelurahan yang menagih PBB kepada wajib pajak juga dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan pajaknya. Pengaruh yang diberikan tersebut dapat terjadi apabila terdapat kontrol dari petugas desa/kelurahan yang benar-benar dirasakan oleh wajib pajak. Semakin besar kontrol yang diberikan, maka pengaruh tingkat ekonomi terhadap kepatuhan PBB yang telah dibentuk semakin memperlihatkan kecenderungan niat (*intention*) yang semakin kuat. Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari dalam diri wajib pajak yang diperkuat dengan pengaruh dari luar wajib pajak. Niat tersebut kemudian memunculkan perilaku (*behavior*) patuh terhadap pajak.. Dari sebab itu, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis:

*H4: Kontrol Petugas Desa/Kelurahan memperkuat pengaruh antara Tingkat Ekonomi WP PBB Kabupaten Demak terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.*

### **Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan PBB**

Pengetahuan pajak merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak sadar mengenai arti penting dan manfaat dari pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara, maka wajib pajak dengan sukarela melakukan pembayaran pajak secara tertib dan tepat waktu. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai pajak yang baik seharusnya dimiliki oleh setiap wajib pajak agar dapat timbul kesadaran akan pajak dari masing-masing individu dan mendorong tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Dengan demikian, semakin baik pengetahuan pajak dari wajib pajak, diharapkan semakin baik pula niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak bumi dan bangunannya. Dari sebab itu, dirumuskan hipotesis:

*H5: Pengetahuan pajak WP PBB Kabupaten Demak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.*

### **Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan PBB dengan moderasi Kontrol Petugas Desa/Kelurahan**

Pengetahuan pajak yang mendorong kesadaran pajak dapat berhubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak dalam ketepatan pembayaran pajak. Akan tetapi, ketika terjadi faktor dari luar wajib pajak seperti adanya kontrol petugas desa/kelurahan yang menagih PBB kepada wajib pajak juga dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pajaknya. Kontrol petugas desa/kelurahan yang semakin dirasakan oleh wajib pajak dapat memperkuat keyakinan wajib pajak tersebut akan adanya suatu kontrol diluar kehendak pribadinya. Kontrol yang berasal dari luar pribadi tersebut kemudian memperkuat niat yang berasal dari dalam, yaitu pengetahuan pajak untuk menunjukkan perilaku patuh. Dengan demikian, adanya kontrol petugas desa/kelurahan tersebut dapat semakin memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan PBB. Dari penjelasan tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis:

*H6: Kontrol Petugas Desa/Kelurahan memperkuat pengaruh antara Pengetahuan Pajak WP PBB Kabupaten Demak terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.*

### **Kepatuhan PBB**

Wajib pajak bumi dan bangunan yang sangat banyak mengakibatkan semakin beragamnya latar belakangnya. Keberagaman latar belakang itulah yang nantinya membentuk pola pikir dan sikap dari wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajibannya. Karakteristik yang telah dibentuk dari penduduk di berbagai wilayah tersebut mengakibatkan perbedaan cara berpikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selain perbedaan cara berpikir dan berperilaku, karakteristik keragaman wilayah Indonesia tersebut juga dapat terlihat dalam mata pencaharian dari penduduk setempat. Dengan adanya karakteristik penduduk yang berbeda antara wilayah yang satu dengan yang lain, maka akan berpotensi untuk terdapat perbedaan kepatuhan pajak antara wajib pajak bumi dan bangunan yang bertinggal di desa dengan wajib pajak bumi dan bangunan yang bertinggal di kota. Oleh karena itu, dapat dirumuskan suatu hipotesis:

*H7: Terdapat perbedaan kepatuhan PBB antara WP PBB desa dan kota di Kabupaten Demak.*

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Penelitian**

Kepatuhan PBB yang digunakan sebagai variabel bebas diartikan sebagai suatu sikap dari wajib pajak bumi dan bangunan untuk mau menaati aturan yang telah ditetapkan yang mengatur mengenai pajak bumi dan bangunan (Asri, 2009).

Pengetahuan Umum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yg diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran) (KBBI Daring, 2008). Dengan demikian, pengetahuan umum yang dimiliki wajib pajak adalah mengenai cara pandang wajib pajak bumi dan bangunan terhadap hal yang berkaitan dengan pendidikan, media, dan informasi. Status ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Apabila seseorang atau keluarga dapat memenuhi semua kebutuhan pokok, sekunder, maupun tersiernya secara mandiri, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut mempunyai kondisi ekonomi yang sangat baik. Dengan demikian, tingkat

ekonomi yang dimaksudkan dalam penelitian ini menyangkut pendapatan dan pengeluaran yang dimiliki wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Demak, sehingga menimbulkan suatu gaya hidup tertentu. Pengetahuan pajak yang dimaksud adalah mengenai seberapa banyak wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Peraturan pajak yang dimaksud adalah peraturan mengenai pajak bumi dan bangunan yang dasarnya tertulis dalam Undang-undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994.

Tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kontrol keprilakuan tersebut yaitu kemungkinan diperiksa oleh fiskus, kemungkinan dikenai sanksi, dan kemungkinan dilaporkan oleh pihak ketiga (Blathorne, 2000, Bobek dan Harfield, 2003, Mustikasari, 2003). Dengan demikian, Kontrol Petugas Desa / Kelurahan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan pertanyaan kuisisioner mengenai adanya peringatan, teguran, sanksi, denda yang dilakukan oleh petugas desa / kelurahan selaku pihak yang bertugas untuk memungut PBB.

Pada tabel 1 disajikan klasifikasi variabel dan variabel indikator yang digunakan dalam kuisisioner penelitian ini. Semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini diukur menggunakan kuisisioner yang diukur dengan skala likert 5 poin, dari persepsi responden bahwa responden sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju terhadap suatu pernyataan yang ada dalam kuesioner.

**Tabel 1**  
**Klasifikasi Variabel dan Variabel Indikator**

No	Variabel	Variabel Indikator
1	Kepatuhan PBB	1. Ketepatan waktu pembayaran PBB 2. Kepatuhan pembayaran PBB sesuai tagihan 3. Kesukarelaan pembayaran PBB
2	Pengetahuan Umum	1. Pengimplementasian pengetahuan umum dalam keseharian 2. Keinginan untuk pengembangan pengetahuan dan kemampuan 3. Asumsi pribadi mengenai ilmu pengetahuan 4. Ketertarikan pribadi terhadap berita
3	Tingkat Ekonomi	1. Kemampuan pemenuhan kebutuhan 2. Kemampuan untuk menabung 3. Kecenderungan pribadi dalam membeli barang
4	Tingkat Pengetahuan Pajak	1. Pemahaman fungsi PBB 2. Pemahaman aturan dan undang-undang pajak 3. Mengetahui pihak yang memungut PBB 4. Pemahaman prosedur pembayaran PBB
5	Kontrol Petugas Desa/Kelurahan	1. Peningkatan oleh petugas agar membayar sesuai tagihan 2. Peneguran oleh petugas agar membayar tepat waktu 3. Kemungkinan dikenakan sanksi denda 4. PEMBERLAKUAN bukti pembayaran PBB dalam pengurusan administrasi di kelurahan

### Penentuan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak bumi dan bangunan di daerah Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, pada tahun 2011 tercatat jumlah penduduk Demak sebesar 1.073.684 jiwa ([www.demakkab.bps.go.id](http://www.demakkab.bps.go.id)). Adapun sampel yang digunakan oleh peneliti adalah sebanyak 54 wajib pajak yang terdiri dari 27 wajib pajak desa dan 27 wajib pajak kota. Sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang dapat mengklasifikasikan wajib pajak tersebut bertinggal di daerah desa dan kota Kabupaten Demak.

### Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini, karena data yang digunakan adalah data kualitatif, maka analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantifikasi data-data penelitian ke dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan skala Likert 5 poin. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji

Beda T-Test dan Uji Regresi dengan variabel moderating. Uji regresi dengan variabel moderating dilakukan dengan uji interaksi untuk model regresi dan uji residual untuk menguji variabel moderating. Pengujian dilakukan menggunakan program SPSS versi 21 for Windows.

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_1X_4 + b_6X_2X_4 + b_7X_3X_4 + e$$

$$X_4 = a + b_1 X_1 + b_1 X_2 + b_1 X_3 + e$$

$$| e | = a + b_1 Y$$

Keterangan:

- Y : Kepatuhan PBB
- $\alpha$  : Bilangan konstanta
- $b_1 \dots b_7$  : Koefisien arah persamaan penelitian
- X1 : Pengetahuan Umum
- X2 : Tingkat Ekonomi
- X3 : Pengetahuan Pajak
- X4 : Kontrol petugas pajak
- e : Kesalahan pengganggu (*disturbance's error*)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini, diperoleh 54 sampel yang berdasarkan tempat tinggal responden dibedakan menjadi 2 bagian yaitu pedesaan dan perkotaan. Pengklasifikasian tersebut didasarkan pada lingkungan sosial, mata pencaharian, dan wilayah tempat tinggal. Adapun distribusi responden berdasarkan tempat tinggalnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2

#### Distribusi Responden Berdasarkan Tempat Tinggal

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Pedesaan	27	50%
2	Perkotaan	27	50%
Total		54	100%

Sumber: Data primer yang diolah Januari 2013

Berdasarkan UMR Kabupaten Demak, klasifikasi tingkat penghasilan responden dalam penelitian ini dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu di atas Rp893.000 dan di bawah Rp 893.000. Distribusi tingkat penghasilan responden dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3

#### Distribusi Tingkat Penghasilan Responden

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Di bawah Rp 893.000	26	48,15%
2	Di atas Rp 893.000	28	51,85%
Total		54	100%

Sumber: Data primer yang diolah Januari 2013

### Deskripsi Variabel

Persentase pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diukur dengan menggunakan nilai *R Squared*. Hasil pengujian persentase pengaruh dari masing-masing variabel pengetahuan umum, tingkat ekonomi, pengetahuan pajak, dan kontrol petugas desa/kelurahan terhadap kepatuhan PBB dapat dilihat pada tabel 4. Dari tabel 4, diketahui bahwa Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak mempunyai pengaruh individual yang sangat kecil, hanya sebesar 0,8%, 0,1%, dan 0,9% terhadap Kepatuhan PBB. Akan tetapi, apabila disertai dengan moderasi dari Kontrol Petugas Desa/Kelurahan, maka akan mempunyai pengaruh yang lebih besar yaitu sebesar 6,3%, 3,6%, dan 6,5%. Dengan demikian, dengan adanya kontrol petugas desa/kelurahan dapat memperbesar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap kepatuhan PBB.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji R Parsial**

No	Variabel	R Squared WP Desa	R Squared WP Kota	R Squared
1	Pengetahuan Umum	0,006	0,073	0,008
2	Tingkat Ekonomi	0,111	0,188	0,001
3	Pengetahuan Pajak	0,004	0,020	0,009
4	Kontrol Petugas Desa / Kelurahan	0,002	0,365	0,174
5	Pengetahuan Umum dengan Moderating Kontrol Petugas Desa / Kelurahan	0,008	0,222	0,063
6	Tingkat Ekonomi dengan Moderating Kontrol Petugas Desa / Kelurahan	0,098	0,365	0,036
7	Pengetahuan Pajak dengan Moderating Kontrol Petugas Desa / Kelurahan	0,005	0,204	0,065

Sumber : Data primer yang diolah Januari 2013

Penelitian ini menggunakan lima variabel yang masing-masing diukur menggunakan pertanyaan-pertanyaan kuisioner dengan skala likert 5 poin. Adapun hasil analisis dari kecenderungan jawaban masing-masing variabel dapat dilihat dalam tabel 5.

**Tabel 5**  
**Deskripsi Variabel**

No	Variabel	Item Valid	Kisaran Teoritis	Kisaran Empiris	Rata- rata Teoritis	Rata-rata Empiris WP DESA	Rata-rata Empiris WP KOTA	Rata- rata Empiris
1	Kepatuhan Pajak	4	4 – 20	9 – 20	12	15,78	16	15,89
2	Pengetahuan Umum	5	5 – 25	13 – 24	15	19,70	21,19	20,44
3	Tingkat Ekonomi	6	6 – 30	7 – 27	18	12,26	22,81	17,54
4	Pengetahuan Pajak	5	5 – 25	4 – 24	15	16,41	20,78	18,59
5	Kontrol Petugas Desa/ Kelurahan	4	4 – 20	8 – 19	12	15,70	15,78	15,74

Sumber : Data primer yang diolah Januari 2013

Dari tabel 5 terlihat bahwa Kepatuhan PBB dan Kontrol Petugas Desa/Kelurahan dari WP Desa dan WP Kota di Kabupaten Demak memiliki selisih nilai yang tidak berbeda jauh. Selain itu, rata-rata empiris yang dihasilkan lebih besar daripada rata-rata teoritis yang hanya sebesar 12. Dengan demikian dapat diindikasikan bahwa Kepatuhan PBB dan Kontrol Petugas Desa/Kelurahan dari masyarakat Kabupaten Demak tidak berbeda antara Desa dan Kota dan dapat dikatakan baik.

Dalam tabel 5 juga menunjukkan bahwa rata-rata empiris Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak dari WP Desa mempunyai nilai yang berbeda dari WP Kota. Dari ketiga variabel tersebut terlihat bahwa WP Desa mempunyai rata-rata empiris yang lebih kecil daripada WP Kota. Hal tersebut berarti bahwa Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak yang dimiliki oleh WP Kota lebih baik daripada WP Desa.

Di sisi lain, rata-rata empiris variabel Pengetahuan Umum dan Pengetahuan Pajak dari WP PBB di Kabupaten Demak mempunyai nilai yang lebih tinggi dari rata-rata teoritisnya. Hal tersebut berarti bahwa WP PBB di Kabupaten Demak mempunyai pengetahuan umum dan pengetahuan

pajak yang baik. Akan tetapi, nilai rata-rata empiris Tingkat Ekonomi yang lebih rendah daripada rata-rata teoritisnya berarti bahwa tingkat ekonomi WP PBB masih dalam golongan menengah ke bawah.

#### Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Umum responden mempunyai nilai signifikansi 0,055. Hal ini berarti bahwa pengaruh Pengetahuan Umum terhadap Kepatuhan PBB tidak signifikan pada taraf signifikansi 5%. Akan tetapi, pada asumsi taraf signifikansi 10%, pengetahuan umum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan umum yang dimiliki oleh WP PBB lebih berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan keseharian. Wajib pajak tidak mempunyai ketertarikan yang lebih terhadap berita-berita yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari mereka. Akan tetapi, wajib pajak mempunyai keyakinan bahwa semua ilmu adalah penting untuk dipelajari dan senantiasa berupaya untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, pengetahuan umum yang dimiliki oleh WP PBB di Kabupaten Demak mempunyai pengaruh yang lemah terhadap kepatuhan pajaknya bila diasumsikan pada taraf signifikansi 5%, tetapi masih dapat mempengaruhi kepatuhan pajak bumi dan bangunan dengan kuat pada asumsi nilai signifikansi 10%.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pengetahuan umum yang disertai dengan adanya kontrol petugas desa/kelurahan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan. Hal tersebut dikarenakan dewasa ini masyarakat sering dikejutkan oleh berita seputar penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan. Hasil pemikiran dari keadaan riil yang terjadi dan diketahui oleh masyarakat melalui berita tersebut dapat mempengaruhi kecenderungan wajib pajak untuk berperilaku. Oleh karena itu adanya moderasi Kontrol Petugas Desa/Kelurahan selaku pihak yang berwenang untuk memungut pajak dapat memperlemah hubungan pengetahuan umum terhadap kepatuhan PBB wajib pajak yang bersangkutan karena melalui berita di media, wajib pajak telah banyak mengetahui terjadinya kasus penyelewengan dan penyalagunaan dana yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa tingkat ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan PBB. Keadaan ekonomi yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menjadi suatu dorongan motivasi untuk dapat memenuhi kewajiban PBB yang dimiliki. Di sisi lain, apabila seseorang mempunyai kondisi ekonomi yang tinggi, maka tingkatan kebutuhan dari orang tersebut akan semakin banyak dan beragam. Hirarki kebutuhan manusia yang diungkapkan oleh Maslow menjelaskan bahwa manusia mempunyai tingkatan kebutuhan yang dapat membedakan setiap manusia dari sisi kesejahteraan hidupnya. Semakin tinggi kesejahteraan manusia, maka tingkatan yang ingin dipenuhi akan semakin tinggi, dan dengan demikian, pemenuhan-pemenuhan kewajiban akan semakin beragam pula. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat ekonomi dari wajib pajak, maka keinginan yang mendorong untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin rendah karena beragamnya kebutuhan yang harus dicapai.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Hipotesis**

No	Model	Beta	Sig.
1	TotalPengetahuanUmum	3.645	.062
2	TotalTingkatEkonomi	-5.502	.001
3	TotalPengetahuanPajak	-.423	.782
4	TotalKontrolPetugas	2.613	.192
5	moderatX1_X4	-6.038	.049
6	moderatX2_X4	6.052	.001
7	moderatX3_X4	.649	.737

Sumber : Data primer yang diolah Januari 2013

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa hipotesis keempat diterima. Kontrol Petugas Desa/Kelurahan yang memoderasi hubungan Tingkat Ekonomi dengan Kepatuhan Pajak mempunyai koefisien parameter 0,140 dengan nilai signifikansi 0,001. Adanya kontrol dari petugas desa/kelurahan yang memberlakukan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran PBB semakin membuat wajib pajak untuk selalu membayar PBB tepat pada waktunya. Dengan

demikian, motivasi wajib pajak untuk berperilaku patuh akan semakin kuat dan pemenuhan kewajiban tersebut menjadi salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi sesuai dengan harapan normatif yang muncul. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontrol petugas desa/kelurahan dapat memperkuat hubungan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan pajak secara signifikan.

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa hipotesis kelima ditolak. Hasil pengujian dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan pajak mempunyai nilai signifikan 0,862. responden yang merupakan wajib pajak PBB tidak mempunyai pengetahuan pajak yang mendalam. Responden tidak mengetahui aturan, sistem, serta penggunaan pajak secara mendalam dan jelas. Pengetahuan mengenai perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak hanya sebatas pada pengetahuan tahu sehingga pengetahuan mengenai perpajakan tersebut tidak dapat mempengaruhi niat individu untuk berperilaku patuh.

Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan PBB dengan variabel moderating kontrol petugas desa/kelurahan adalah tidak signifikan, dengan nilai signifikansi 0,737. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan pajak yang dimiliki oleh responden hanya sebatas pada pengetahuan tahu. Di samping itu, wajib pajak hanya mengerti bahwa ada petugas yang memungut pajak tetapi tidak mengerti secara mendalam mengenai aturan dan prosedur dalam pembayaran PBB. Oleh karena itu, dengan adanya moderasi dari kontrol petugas desa/kelurahan yang memungut PBB tidak akan berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan PBB yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Independen Samples Test**

Variabel	Levene's Test for Equality of Variances sig.	T-test for Equality of Means sig. (2-tailed)
Kepatuhan PBB	Equal variances assumed	0,752
	Equal variances not assumed	0,752

Sumber : Data primer yang diolah Januari 2013

Hasil pengujian hipotesis terakhir menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan Kepatuhan PBB antara WP Desa dan WP Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari equal variances assumed Kepatuhan PBB sebesar 0,752 dan berada jauh di atas nilai signifikan 0,05 (tabel 7). Hal tersebut berarti bahwa Kepatuhan PBB antara WP Desa dan WP Kota adalah sama. Di samping itu, karakteristik Kabupaten Demak yang mempunyai basis agama yang kuat dengan slogannya "Demak Kota Wali" membuat masyarakatnya senantiasa hidup dalam ajaran agamanya. Dengan mempunyai patokan pada agama yang kuat, maka wajib pajak mempunyai anggapan bahwa selama hidup di dunia ini harus senantiasa melakukan hal-hal baik dan memenuhi berbagai kewajiban yang merupakan tanggung jawab dalam hidup. Salah satu kewajiban dalam hidup adalah kewajiban untuk menjadi warga negara yang baik dengan membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian, kepatuhan pajak yang ditunjukkan oleh wajib pajak di Kabupaten Demak adalah baik dan tidak ada perbedaan antara WP Desa dan WP Kota.

#### **KESIMPULAN DAN KETERBATASAN**

Dari hasil pembahasan di atas, diketahui bahwa Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak mempunyai pengaruh individual yang sangat kecil terhadap Kepatuhan PBB. Akan tetapi, apabila disertai dengan moderasi dari Kontrol Petugas Desa/Kelurahan, maka akan mempunyai pengaruh yang lebih besar. Dengan demikian Kontrol Petugas Desa/Kelurahan merupakan variabel yang memoderasi antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat Kepatuhan PBB. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil uji residual dimana memperlihatkan koefisien negatif pada nilai signifikan 0,048.

Pengetahuan Umum dan Pengetahuan Pajak yang dimiliki oleh responden hanya sebatas pada pengetahuan tahu, sehingga tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

Kepatuhan Pajak. Akan tetapi, Tingkat ekonomi yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menimbulkan adanya harapan normatif yang timbul dan adanya tingkatan motivasi tertentu bagi wajib pajak untuk semakin mencapai kesejahteraan dengan kondisi ekonomi yang dimiliki. Oleh karena itu, Tingkat Ekonomi yang dimiliki oleh wajib pajak mempengaruhi kepatuhan pajaknya secara signifikan dan negatif.

Kontrol Petugas Desa/Kelurahan sebagai pemungut PBB tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara WP Desa dan WP Kota. Disisi lain, Kontrol Petugas Desa/Kelurahan tidak dapat memoderasi hubungan antara Pengetahuan Pajak karena wajib pajak tidak mengerti secara jelas mengenai aturan dan prosedur dalam pembayaran PBB. Akan tetapi, Kontrol Petugas Desa/Kelurahan dapat memperkuat pengaruh antara Tingkat Ekonomi terhadap Kepatuhan PBB, tetapi memperlemah pengaruh antara Pengetahuan Umum terhadap Kepatuhan PBB. Hal tersebut dikarenakan seringnya terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat pemerintah. Oleh karena itu, kontrol petugas desa/kelurahan juga akan terkena dampak ketidakpercayaan wajib pajak kepada aparat pemerintah yang seringkali melakukan penyalahgunaan wewenang.

Dari hasil penelitian juga diperoleh hasil bahwa Kepatuhan PBB dari wajib pajak desa dan kota tidak menunjukkan adanya perbedaan. Hal tersebut juga berlaku pada Kontrol Petugas Desa dan Kelurahan. Akan tetapi, Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak dari WP desa dan kota menunjukkan ada perbedaan karena nilai signifikansi yang kurang dari 0,05. Dengan demikian, disimpulkan bahwa dengan adanya Kontrol Petugas Desa/Kelurahan yang sama, maka akan menghasilkan suatu perilaku kepatuhan pembayaran PBB yang sama walaupun wajib pajak mempunyai latar belakang pengetahuan umum, tingkat ekonomi, dan pengetahuan pajak yang berbeda.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. *Pertama*, keterbatasan dalam membaca (buta huruf) pada sampel responden WP Desa membuat peneliti harus *door to door* untuk menanyakan kuisisioner secara langsung. *Kedua*, populasi penelitian yang sempit, hanya meliputi Kabupaten Demak tidak dapat mewakili hasil yang sama terhadap semua WP PBB. *Ketiga*, sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah kecil sehingga tidak dapat digeneralisasi. *Keempat*, data yang digunakan untuk pengujian penelitian yang berasal dari kuisisioner yang diisi oleh WP PBB dapat menyebabkan adanya subjektifitas dan tidak sesuai dengan kenyataan.

Dari keterbatasan tersebut, maka penelitian selanjutnya disarankan agar memperluas populasi penelitian supaya hasil yang diperoleh akan lebih dapat digeneralisasi. *Kedua*, emperbanyak sampel penelitian sehingga hasil yang diperoleh dapat digeneralisasi. *Ketiga*, melakukan pengambilan data terhadap aparat pajak, sehingga dapat diperoleh data dari dua sisi yaitu dari wajib pajak dan dari aparat penegak pajak. Dengan demikian, hasil yang diperoleh diharapkan akan lebih objektif dan spesifik.

## REFERENSI

- Abdalla, Taufiq Umar. 2010. Analisis Kesiapan Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009. Skripsi Program S1 Universitas Indonesia Depok
- Adriana, Dadi. 2003. *Peraturan Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Ajzen, Icek. 2002. *Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations*. September (Revised January, 2006)
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Skripsi Program S1 Universitas Diponegoro Semarang
- Azwar, Saifudin. 1997. *Reabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar



- Badan Pusat Statistik. 2012. *Realisasi Penerimaan Negara (milyar rupiah), 2007-2012*. Message posted to [http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=13&notab=1](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_subyek=13&notab=1). Diakses 27 September 2012.
- Bobek, D., Ricard C. Hatfield. 2003. An Investigation of Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. *Behavioral Research in Accounting*.
- Hanno, D. M. and G.R. Violette. 1996. An Analysis of Moral and Social Influences on Tax Payer Behavior. *Behavioral Research in Accounting*.
- Harinurdin, Erwin. 2009. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Bisnis dan Informasi Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. 16 No.2
- Kementrian Keuangan. 2012. *Belajar Pajak*. Message posted to <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>. diakses 27 September 2012
- Laksono, Jati Purbo. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang. Skripsi Program S1 Universitas Diponegoro Semarang. Tidak dipublikasikan.
- Mustikasari, Elia. 2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Symposium Nasional Akuntansi X*:1-42
- Richardson, G. 2006. Determinants of Tax Evasion: A Cross Country Investigation. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 15, 150-169.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat